



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

LKIP

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Kabupaten Bolaang Mongondow

TAHUN 2025

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKIP)
TAHUN 2025**



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOWDINAS
TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
Jl. Trans Sulawesi Desa Lolak Tombolango Kec. Lolak 956

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2025 dapat tersusun sesuai jadwal.

Laporan ini disusun dengan mendasar pada Renstra Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Bolaang Mongondow tahun 2023-2026 dan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Bupati Bolaang Mongondow atas amanah yang telah diberikan. Isi laporan ini menunjukkan gambaran sejauh mana kinerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2025.

Meskipun segala upaya telah dilakukan namun laporan ini masih jauh dari harapan. Oleh karena itu masukan dan saran yang membangun sangat kami harapkan sebagai upaya kami menuju kesempurnaan LKIP ini.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2025 kami sampaikan untuk diperiksa. Terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah mendukung tersusunnya laporan ini, semoga dapat memberi manfaat, amien.

Lolak, Januari 2026
Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
Kab. Bolaang Mongondow


RENTI MOKOGINTA S.Pd, MAP
NIP. 1970069 199801 1 002

DAFTARISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
PENDAHULUAN	6
BAB I	
1.1 Gambaran Umum Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja	6
1.2 Permasalahan Utama Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja	9
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1 Perencanaan Strategis	10
2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2025	13
2.3 Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025	14
2.4 Rencana Kinerja Tahunan	15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	16
3.2 Realisasi Anggaran	52
BAB IV PENUTUP	
4.1 Kesimpulan Atas Capaian Kinerja Organisasi	57
4.2 Saran Tindak Lanjut	58
LAMPIRAN Lampiran	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Tujuan dan Sasaran Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Tahun 2024	13
Tabel 2.2	Revisi Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Tahun 2025	14
Tabel 2.3	Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025	15
Tabel 2.4	Rencana Kerja Tahunan Tahun 2025	16
Tabel 3.1	Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Angka Partisipaangkatan kerja Tahun 2025	21
Tabel 3.2	Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Angka Partisipasi Angkatan Kerja Tahun 2024 dan 2025	22
Tabel 3.3	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Angka Partisipasi Angkatan Kerja Tahun 2024 s/d 2025.....	23
Tabel 3.4	Capaian Indikator Kinerja Angka Partisipasi angkatan kerja Terhadap Standar Nasional Tahun 2024 dan Tahun 2025	24
3.5	Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan Atau Peningkatan / Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan	25
3.6	Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya	25
3.7	Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan	25
Tabel 3.8	Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Pencarai Kerja yang Ditempatkan Tahun 2025	27
Tabel 3.9	Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Pencarai Kerja yang Ditempatkan Tahun 2024 dan 2025	28
Tabel 3.1.1	Perbandingan Capaian Indikator Kinerja PencariKerja yang Ditempatkan Tahun 2024 dan 2025	29
Tabel 3.1.2	Capaian Indikator Kinerja PencariKerja yang Ditempatkan Terhadap Standar Nasional Tahun 2024 dan Tahun 2025	30
Tabel 3.1.3	Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan Atau Peningkatan / Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan	31
Tabel 3.1.4	Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya	32
Tabel 3.1.5	Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan	32
Tabel 3.1.6	Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2025	34
Tabel 3.1.7	Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2025 dan 2025	35
Tabel 3.1.8	<i>Capaian Indikator Kinerja Sasaran Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2024 s/d 2025 .</i>	36
Tabel 3.1.9	Capaian Indikator Kinerja Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Standar Nasional Tahun 2024 dan Tahun 2025	37
Tabel 3.2.1	Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan Atau Peningkatan / Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan	38
Tabel 3.2.2	Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya	38
Tabel 3.2.3	Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan	38
Tabel 3.2.4	Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Tahun 2025	40

Tabel 3.2.5	Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2024 dan 2025	41
Tabel 3.2.6	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Cakupan Wilayah Transmigrasi Yang Sarana Dan Prasarananya Memadai Tahun 2024 s/d 2025	42
Tabel 3.2.7	Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan Atau Peningkatan / Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan	44
Tabel 3.2.8	Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya.....	44
Tabel 3.3.9	Perbandingan Capaian Anggaran Tahun 2024 dan Tahun 2025	45

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1	Target dan Realisasi Angka Partisipasi Angkatan Kerja tahun 2025	21
Grafik 2	Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Angka Partisipasi Angkatan Tahun 2024 dan Tahun 2025	22
Grafik 3	Angka Partisipasi Angkatan Kerja Tahun 2023 s/d Tahun 2024	23
Grafik 4	Angka Partisipasi Angkatan Kerja Terhadap Standar Nasional Tahun 2024 dan Tahun 2025 ...	24
Grafik 5	Target dan Realisasi Pencarai Kerja yang Ditempatkan tahun 2025	27
Grafik 6	Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Pencarai Kerja yang Ditempatkan Tahun 2024 dan Tahun 2025	28
Grafik 7	Pencari Kerja yang Ditempatkan Tahun 2024 s/d Tahun 2025	30
Grafik 8	Realisasi Kinerja Tahun 2024 dan Tahun 2025 Terhadap Standar Nasional	31
Grafik 9	Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2024 Dan 2025	35
Grafik 10	Capaian Tingkat Pengangguran terbuka tahun 2024 – 2025	36
Grafik 11	Capaian Indikator Kinerja Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Standar Nasional Tahun 2024 dan Tahun 2025	37
Grafik 12	Target dan Realisasi cakupan wilayah transmigrasi yang sarana dan prasarananya memadai tahun 2025	41
Grafik 13	Perbandingan Capaian Indikator Kinerja cakupan wilayah transmigrasi yang sarana dan prasarananya memadai Tahun 2024 dan Tahun 2025	42
Grafik 14	<i>Capaian Indikator Kinerja Sasaran Cakupan Wilayah Transmigrasi Yang Sarana Dan Prasarananya Memadai Tahun 2024 s/d 2025</i>	<i>43</i>

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. GAMBARAN UMUM DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KAB. BOLAANG MONGONDOW

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bolaang Mongondow adalah salah satu Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 32 Tahun 2022 Tentang kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja perangkat daerah.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bolaang Mongondow mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintahan dibidang Transmigrasi dan Tenaga Kerja serta ketatausahaan Dinas. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bolaang Mongondow menyelenggarakan fungsi:

1.1.1. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;

Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi tersebut, maka dalam pelaksanaannya Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Bolaang Mongondow memiliki struktur organisasi sebagai berikut:

1. Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
2. Sekretaris Dinas

Membawahi 1 (satu) sub bagian, dan 1 (satu) Pejabat Fungsional yaitu:

- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- Perencana

3. Kepala Bidang Pelatihan Kerja dan Penempatan Tenaga kerja
Membawahi 2 (dua) Pejabat Fungsional, yaitu:
 - Pengantar Kerja
 - Instruktur
4. Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga kerja
Membawahi 2 (dua) Pejabat Fungsional, yaitu:
 - Mediator Hubungan Industrial
 - Penguji Keselamatan dan Kesehatan Kerja
5. Kepala Bidang Perencanaan Transmigrasi dan Persebaran Penduduk
Membawahi 2 (dua) Pejabat Fungsional, yaitu:
 - Instruktur
 - Pengantar Kerja
6. Kepala Bidang Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi
Membawahi 2 (dua) Pejabat Fungsional, yaitu:
 - Instruktur
 - Mediator Hubungan Industrial

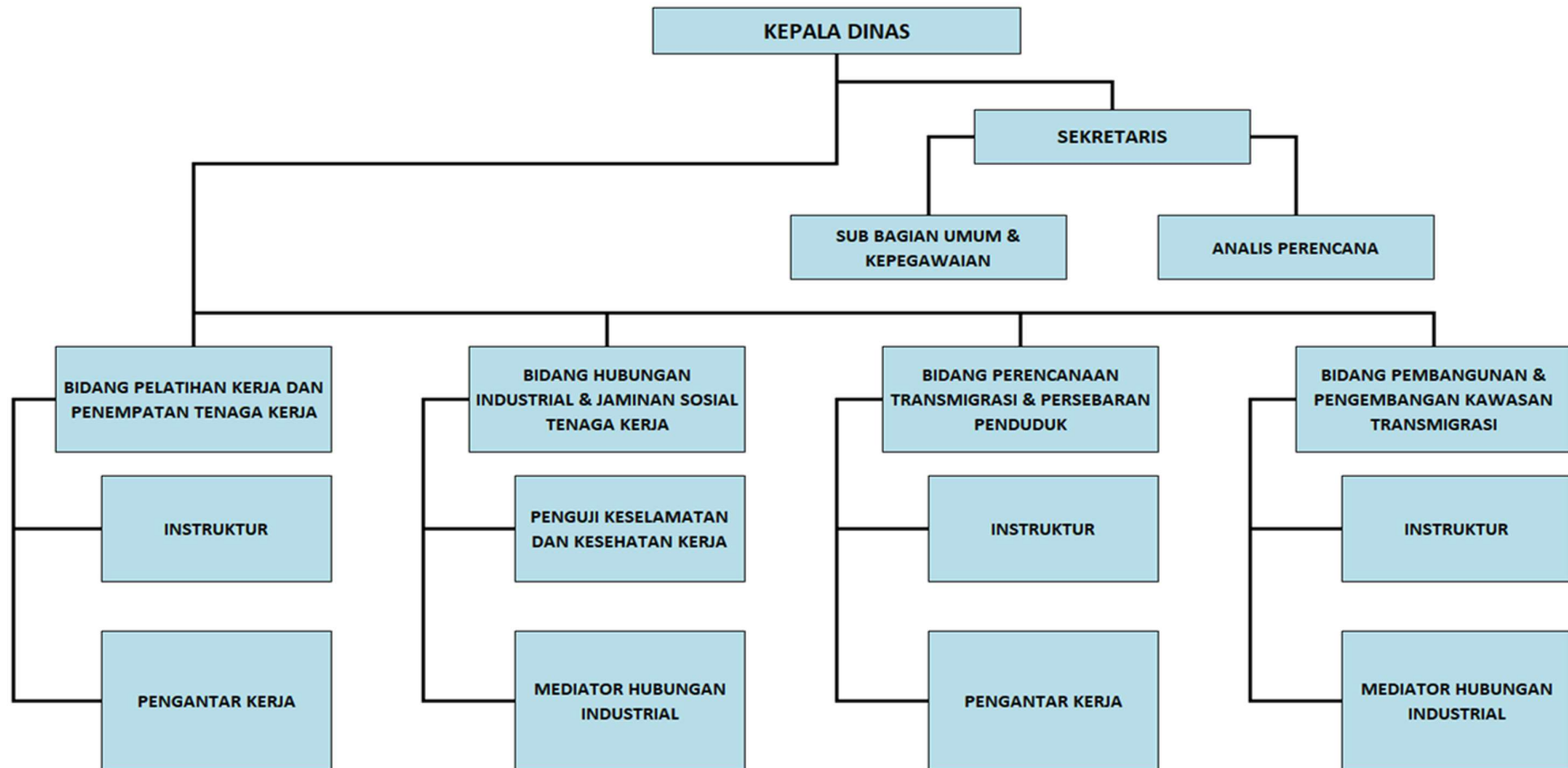
Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bolaang Mongondow sampai dengan akhir tahun 2025, didukung oleh Sumber Daya Manusia sebanyak 20 (dua puluh) orang Aparatur Sipil Negara dan 6 (enam) orang tenaga honorer/sukarela dan tenaga K2

1.1.2. Jabatan Struktural dan Fungsional

Jumlah pegawai berdasarkan Jabatan Struktural dan fungsional terdiri atas :

No	JABATAN	ESELON		DIKLAT PIM	
		TINGKAT	JUMLAH	TINGKAT	JUMLAH
1	Kepala Dinas	II/b	1	II	--
2	Sekretaris	III/a	1	III	--
3	Kepala Bidang	III/b	4	III	--
4	Kasubag/Kepala Seksi	IV/a	1	IV	4
5	Fungsional		8		
6	Staf		5	--	--
Total :			20		4

Bagan Struktur Organisasi Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2023



1.2. PERMASALAHAN UTAMA BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW.

Dalam penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Bolaang Mongondow menghadapi berbagai permasalahan.

Berikut ini beberapa permasalahan yang berpengaruh terhadap kinerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga kerja Kabupaten Bolaang Mongondow meliputi :

1. Terbatasnya Sumber Daya Aparatur.
2. Terbatasnya Sarana dan Prasarana.
3. Masih minimnya alokasi anggaran ketransmigrasian dan ketenagakerjaan yang bersumber dari APBD.
4. Tingginya Migrasi tenaga kerja dari daerah lain ke Kabupaten Bolaang Mongondow
5. Masih rendahnya tingkat Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja.
6. Pencari kerja masih memilih-milih lapangan pekerjaan pada sektor formal.
7. Angka pengangguran masih relatif tinggi.
8. Variasi lapangan kerja yang tersedia masih terbatas.
9. Jiwa dan semangat kewirausahaan masih kurang.
10. Belum semua perusahaan yang mempekerjakan pekerja / buruh lebih dari 50 orang membentuk LKS Bipartit, sementara LKS Bipartit yang ada belum berfungsi dengan baik. Sementara LKS Bipartit yang ada belum berfungsi dengan baik
11. Belum semua perusahaan mewajibkan pekerjanya mengikuti Program Jamsostek.
12. Perusahaan yang tidak memperhatikan hak-hak buruh masih ada.
13. Adanya Pemutusan Hubungan Kerja.
14. Perselisihan Hubungan Industrial masih relatif tinggi.
15. Lahan lokasi permukiman transmigrasi semakin terbatas.
16. Banyaknya tuntutan ganti rugi ekstran transmigrasi

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. PERENCANAAN STRATEGIS

2.1.1. Visi dan misi pembangunan Kabupaten Bolaang Mongondow:

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Bolaang Mongondow maka Visi Pembangunan Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2023-2026 adalah

“Bolaang Mongondow yang baru, berbudaya, berdaya saing dan Mandiri Sebagai Lumbung Pangan Indonesia timur”

Dalam mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Bolaang Mongondow tahun 2023 – 2026 tersebut dirumuskan melalui 5 misi pembangunan yaitu:

1. Mewujudkan Bolaang Mongondow yang berbudaya dan berdaya saing.
2. Mewujudkan pembangunan.
3. Mewujudkan perekonomian daerah yang mandiri bertumpu pada potensi sumberdaya lokal.
4. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik , Bersih, Demokratis dan Bebas KKN.
5. Mewujudkan Bolaang Mongondow Sebagai Lumbung Pangan Di Indonesia Bagian Timur.

Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja selaku organisasi Perangkat Daerah berperan mendukung misi ke 3 Yaitu:

“ Mewujudkan perekonomian daerah yang mandiri bertumpu pada potensi sumberdaya lokal. ”

Tujuan 1: Meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah.

Tujuan 2: Mewujudkan Kawasan Transmigrasi serta menyiapkan areal pemukiman transmigrasi.

2.1.2. Visi dan Misi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Untuk mendukung Visi dan Misi tujuan pembangunan Kabupaten Bolaang Mongondow maka Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Bolaang Mongondow menetapkan.

VISI :

“Mewujudkan perekonomian daerah yang mandiri bertumpu pada potensi sumberdaya lokal”

MISI :

Untuk Mewujudkan Visi Tersebut Maka Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja menetapkan Misi Sebagai Berikut:

1. Menyediakan Informasi dan perencanaan tenaga kerja makro.
2. Meningkatkan Kompetensi Tenaga Kerja melalui pelatihan keterampilan dan pengembangan produktifitas.
3. Memperluas kesempatan kerja melalui penempatan tenaga kerja baik dan maupun keluar negeri dengan memperhatikan norma dan pendapatan yang layak.
4. Mengintensifkan sistim lembaga industrial melalui pembinaan hubungan industrial
5. Meningkatkan perlindungan tenaga kerja melalui pengawasan norma-norma ketenaga kerjaan, norma Jamsostek, norma keselamatan dan kesehatan kerja
6. Menyediakan pemukiman yang memenuhi standart catur layak yaitu layak huni, usaha berkembang, dan hukum,

2.1.3. Tujuan dan Sasaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Tujuan 1 :

Meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah.

Indikator Kinerja Tujuan :

- Pertumbuhan Ekonomi
- Kasus Perselisihan

Sasaran Strategis :

1. Meningkatnya Perluasan Kesempatan Kerja

Indikator Sasaran Strategis :

- Persentase Angka Partisipasi Angkatan Kerja
1. Meningkatnya daya saing dan penyerapan tenaga kerja

Indikator Sasaran Strategis :

- Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka
1. Menurunnya perselisihan Hubungan Industrial (HI)

Indikator Sasaran Strategis :

- Persentase hubungan industrial yang diselesaikan

Tujuan 2

Mewujudkan Kawasan Transmigrasi serta menyiapkan areal pemukiman transmigrasi

Indikator Kinerja Tujuan :

- Areal Kawasan

Sasaran strategis :

1. Meningkatnya Pembinaan Ketransmigrasian

Indikator Sasaran Strategis :

1. Presentase ketersediaan kawasan transmigrasi

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Tahun 2025

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET
1	MENINGKATNYA KESEMPATAN DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA SERTA TERWUJUDNYA PENGEMBANGAN WILAYAH BARU	MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN TENAGA KERJA, HUBUNGAN INDUSTRIAL YANG HARMONIS SERTA PELAKSANAAN PEMBINAAN KETRANSMIGRASIAN	TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA	4.29
			PERSENTASE HUBUNGAN INDUSTRIAL YANG DESELESAIKAN	80
			PERSENTASE KETERSEDIAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	5

2.2. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Sebagai tindak lanjut komitmen Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bolaang Mongondow untuk melaksanakan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bolaang Mongondow tahun 2023-2026, maka disusunlah Perjanjian Kinerja antara Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bolaang Mongondow dengan Bupati Bolaang Mongondow dalam bentuk Perjanjian Kinerja tahun 2025:

Perjanjian Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2025 secara keseluruhan dapat dilihat pada lampiran Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini.

Tabel 2.2.
Revisi Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Tahun 2025

N O	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET	PROGRAM PENDUKUNG	ANGGARAN Rp.
1	MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN TENAGA KERJA, HUBUNGAN INDUSTRIAL YANG HARMONIS SERTA PELAKSANAAN PEMBINAAN KETRANSMIGRASIAN	TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA	5	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	177.108.654
		PERSENTASE HUBUNGAN INDUSTRIAL YANG DESELESAIKAN	75	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	1,318,060,800
		PERSENTASE KETERSEDIAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	60	PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	0

2.3. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama (IKU) Merupakan Ukuran Keberhasilan yang menggambarkan Kinerja Utama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bolaang Mongondow sesuai tugas dan fungsinya.

Indikator Kinerja Utama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2025 dapat dilihat pada table berikut:

Table 2.3
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2025

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKAT OR SASARAN STRATEGIS	FORMULA	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatkan Kesejahteraan Tenaga Kerja, Hubungan Industrial yang harmonis Serta Pelaksanaan Pembinaan Ketransmigrasian	Tingkat Pengangguran Terbuka	$\frac{\text{Jumlah Pengangguran Terbuka}}{\text{Jumlah Angkatan Kerja}} \times 100\%$	4.09	Bidang Pelatihan Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja
		Persentase hubungan industrial yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Kasus Yang diselesaikan dengan perjanjian kerja bersama}}{\text{Jumlah Kasus yang tercatatkan}} \times 100\%$	80	Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
		Presentase ketersediaan kawasan transmigrasi	$\frac{\text{Jumlah Kawasan Transmigrasi yang di Inentivikasi}}{\text{Jumlah Potensi Kawasan Transmigrasi}} \times 100\%$	5	Bidang Perencanaan Transmigrasi dan Pesebaran Penduduk

2.4. RENCANA KINERJA TAHUNAN

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Merupakan Penjabaran atau Turunan dari dokumen perencanaan jangka menengah yaitu Rencana Strategis (RENSTRA). Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2025 ini juga merupakan gambaran kegiatan dan output Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bolaang Mongondow yang di laksanakan dan dicapai pada tahun 2024. Untuk lebih jelasnya Rencana Kinerja Tahunan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bolaang Mongondow dapat di lihat pada table berikut:

Tabel 2.4
RENCANA KINERJA TAHUNAN
TAHUN 2025

<i>SASARAN STRATEGIS</i>	<i>INDIKATOR KINERJA</i>	<i>TARGET</i>
MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN TENAGA KERJA, HUBUNGAN INDUSTRIAL YANG HARMONIS SERTA PELAKSANAAN PEMBINAAN KETRANSMIGRASIAN	TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA	4.29
	PERSENTASE HUBUNGAN INDUSTRIAL YANG DESELESAIKAN	80
	PERSENTASE KETERSEDIAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	5

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Capaian Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bolaang Mongondow untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja.

3.1.1 Pengukuran Kinerja

Banyak metode atau cara yang dapat digunakan dalam mengukur sejauhmana capaian kinerja OPD, salah satunya dengan membandingkan antara realisasi dan target yang tertuang dalam indikator kinerja sasaran. Semakin tinggi persentase perbandingan antara realisasi dengan target, maka semakin tinggi pula capaian kinerjanya. Seberapa besar capaian indikator sasaran Capaian Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bolaang Mongondow, akan dapat dilihat dari seberapa persen rasio antara realisasi dan target yang terdapat pada masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan.

3.1.2 Metode Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi sebagai berikut :

1. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

2. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

Atau :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{(2 \times \text{Rencana}) - \text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

Pengukuran kinerja tahun 2025 dilakukan dengan melihat indikator kinerja pada level sasaran tahun 2025. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator *outcomes* atau minimal *outputs* dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan. Dalam rangka pengukuran dan evaluasi atas kinerja, beberapa program atau kegiatan ditetapkan indikator kinerja *outcomes* yang lebih tinggi (*ultimate outcomes*) serta disajikan perbandingan dengan capaian kinerja pada tahun sebelumnya.

Untuk dapat mengetahui tingkat capaian kinerja, Pengukuran kinerja tahun 2025 dilakukan melalui tahapan yang mencakup:

- a). Pengukuran kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing kelompok indikator kegiatan. Pengukuran kinerja kegiatan ini menggunakan formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan(PKK).
- b). Pengukuran tingkat pencapaian sasaran yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan, sebagaimana dituangkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT), di mana tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan dan indikator makro yang berhubungan dengan sasaran tersebut. Pengukuran pencapaian sasaran ini menggunakan formulir Pengukuran

Kinerja (PK).

3.1.2.1. Metode Penyimpulan Capaian Kinerja Sasaran

Hasil pengukuran capaian kinerja disimpulkan baik untuk masing-masing indikator kinerjanya maupun untuk capaian pada tingkat sasaran. Penyimpulan dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

>85	= Sangat berhasil
70 < X ≤ 85	= Berhasil
55 < X ≤ 70	= Cukup Berhasil
≤55	= Tidak Berhasil

Untuk capaian masing-masing indikator kinerja sasaran disimpulkan berdasarkan "**Metode Rata-Rata Data Kelompok**". Penyimpulan capaian sasaran tersebut dijelaskan berikut ini.

Penyimpulan pada tingkat sasaran dilakukan dengan mengalikan jumlah indikator untuk setiap kategori (sangat berhasil, berhasil, cukup berhasil dan tidak berhasil) yang ada di setiap kelompok sasaran dengan nilai *mean* (rata-rata) skala ordinal dari setiap kategori, dibagi dengan jumlah indikator kinerja sasaran yang ada di kelompok sasaran tersebut.

$$\text{Capaian Sasaran} = \frac{\text{Jumlah Indikator Setiap Kategori} \times \text{Nilai Mean Setiap Kategori}}{\text{Jumlah Indikator Kinerja Sasaran}}$$

Nilai **mean** setiap kategori ditetapkan sebagai berikut:

Sangat Berhasil	: 92,5
Berhasil	: 77,5
Cukup Berhasil	: 62,5
Tidak Berhasil	: 27,5

Hasil perkalian tersebut disimpulkan kembali berdasarkan skala pengukuran ordinal dengan katagori **sangat berhasil, berhasil, cukup berhasil, dan tidak berhasil**.

3.1.3. PENGUKURAN TINGKAT PENCAPAIAN SASARAN

Pengukuran capaian kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bolaang Mongondow terlihat dari sejauh mana pelaksanaan



strategi dalam rangka pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dan dikomitmenkan, dengan capaian kinerja sasaran sebagaimana tertera diatas. Uraian dan analisis capaian kinerja masing - masing sasaran adalah sebagai berikut :

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Meningkatkan Kesejahteraan Tenaga Kerja, Hubungan Industrial yang harmonis Serta Pelaksanaan Pembinaan Ketransmingras ian	Tingkat Pengangguran Terbuka	4.29
	Persentase hubungan industrial yang diselesaikan	80
	Presentase ketersediaan kawasan transmigrasi	5

1. Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka

Pengukuran capaian kinerja sasaran Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka diukur dengan rumus sebagai berikut :

$$\begin{aligned}\text{Tingkat Pengangguran Terbuka} &= \frac{\text{Jumlah Pengangguran Terbuka}}{\text{Jumlah Penduduk Angkatan Kerja}} \\ &= \frac{7,128}{143,432} \times 100 \% \\ &= 4.97 \%\end{aligned}$$

a. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025

Perbandingan capaian kinerja dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bolaang Mongondow terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

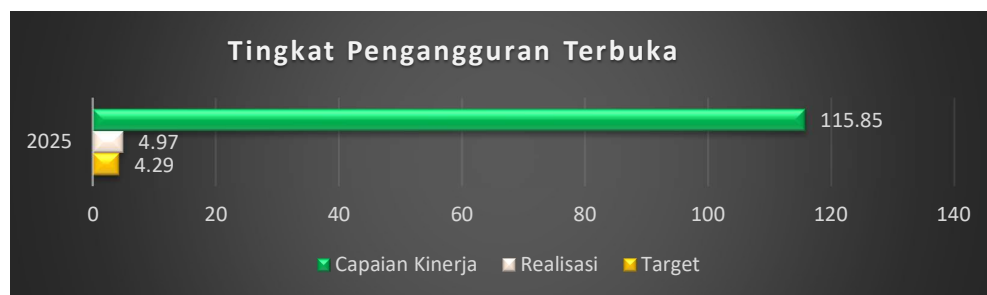
Tabel. 3.6
Capaian Target dan Realisasi
Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2024		
	TARGET	REALISASI	%
Tingkat Pengangguran Terbuka	4.29	4.97	115.85

Sumber : Data Perkiraan BPS Tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas pada tahun 2025 dapat dilihat bahwa indikator Tingkat Pengangguran Terbuka dari Target 4.29% terealisasi 4.97% dengan capaian kinerja 115.85%

Grafik 5 Target, Realisasi dan Capaian Kinerja tahun 2025



b. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 s/d 2025

Perbandingan capaian kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bolaang Mongondow terhadap Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2023 s/d 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

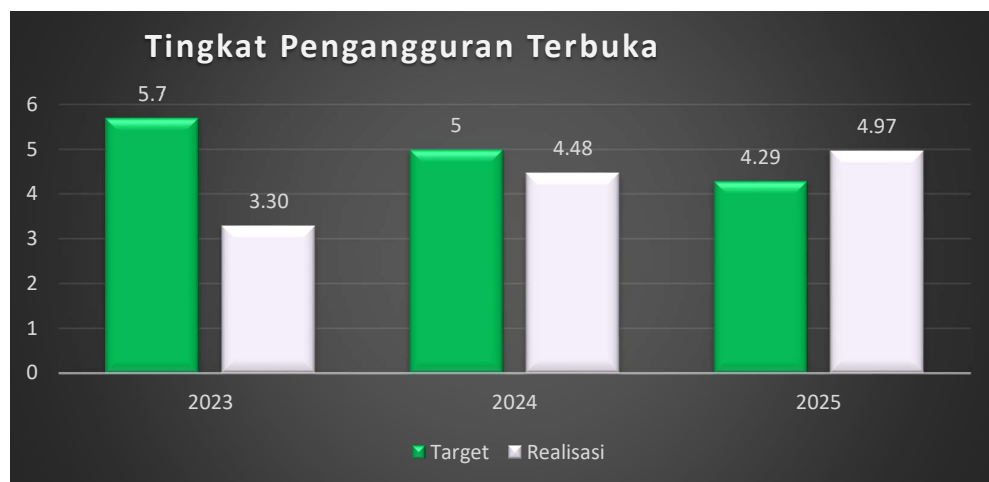
Tabel. 3.7
Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2023 s/d 2025

INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2023			TAHUN 2024			TAHUN 2025			TARGET AKHIR RENSTRA	
	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%		
Tingkat Pengangguran Terbuka	5.7	3.30	172.73	5	4.48	111.57	4.29	4.97	115.85	4.2	7.08

Sumber Data : BPS

Berdasarkan tabel diatas indikator Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka pada tahun 2025 dari target 4.29% terealisasi 4.97% dengan capaian kinerja 115.85%, dibandingkan dengan tahun 2024 ada kenaikan capaian kinerja sebesar 0,04%. Dan capaian kinerja terhadap target akhir renstra sebesar 7.08%. capaian tersebut dapat dilihat juga dalam grafik dibawah ini:

Grafik 6
Perbandingan Capaian Indicator Kinerja Tahun 2023 s/d 2025



c. Capaian Kinerja Terhadap Renstra

Adapun perbandingan capaian indikator Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2024 s/d 2025 terhadap target akhir Renstra dapat kita lihat pada tabel berikut :

Tabel. 3.8
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2024 dan Tahun 2025

Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2024	Capaian Tahun 2025	Target Akhir Renstra
<i>Tingkat Pengangguran Terbuka</i>	111.57	115.85	4.2

Berdasarkan tabel diatas Capaian indikator Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Bolaang Mongondow selama 2 Tahun terakhir ada kenaikan Capaian kinerja, dapat dilihat tabel diatas pada Tahun 2025 mencapai 115.85% dibandingkan dengan Tahun 2024 mencapai 111.57% Mengalami peningkat sebesar 0,04%.

Indikaptor Tingkat Pengangguran Terbuka 2 Tahun Terakhir dapat juga kita lihat pada grafik berikut :

Grafik 7
Capaian Indikator Tingkat Pengangguran terbuka tahun 2024 dan 2025



d. Perbandingan Capaian Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka di Tingkat Kabupaten, Provinsi dan Nasional

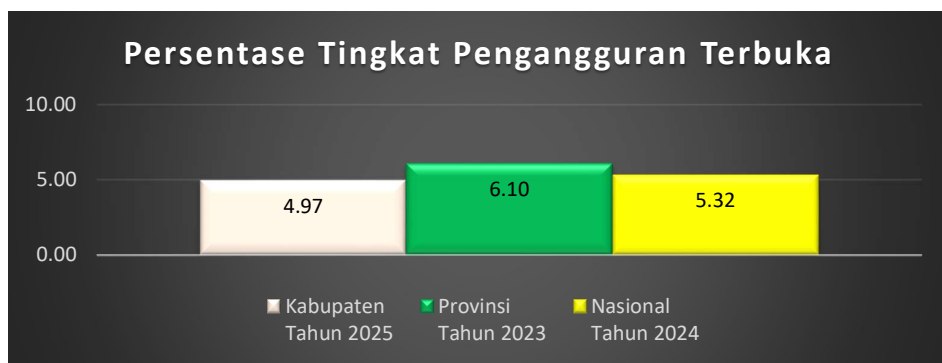
Capaian Indikator Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Bolaang Mongondow dibandingkan dengan capaian di tingkat Provinsi Sulawesi Utara dan Nasional dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 3.9
Capaian Indikator Kinerja Tingkat Pengangguran Terbuka di Tingkat Kabupaten, Provinsi, dan Nasional.

Indikator Kinerja	Kabupaten Tahun 2025	Provinsi Tahun 2023	Nasional Tahun 2024
Tingkat Pengangguran Terbuka	4.97	6.10	4.91

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa capaian Indikator Kinerja Tingkat Pengangguran Terbuka di Tingkat Kabupaten Bolaang Mongondow pada Tahun 2025 sebesar 4.97%. Sedangkan di Provinsi Sulawesi Utara mencapai 6.10%, dan Untuk Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka di tingkat Nasional Mencapai 4.91%. Dapatjuga dilihat pada Grafik Berikut :

Grafik 11
Capaian Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka di tingkat Kabupaten, Provinsi dan Nasional



3.2. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja Alternatif Solusi yang telah dilakukan

Secara umum capaian kinerja sasaran Meningkatkan perluasan kesempatan kerja dengan indikator Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka tahun 2025 sebesar 115.85% dapat dikatakan **“Sangat Berhasil”** hal ini disebabkan :

1. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mengadakan sosialisasi untuk Tenaga Kerja yang berbasis kompetensi.
2. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi melakukan seleksi tenaga kerja yang berbasis kompetensi.
3. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi melakukan perekrutan tenaga kerja yang berbasis kompetensi.

Dengan dilakukannya langkah – langkah di atas ke depannya akan berdampak pada tercapainya sasaran yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja maupun Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2023 – 2026.

3.3. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tingkat Efisiensi pada indikator Tingkat Pengangguran Terbuka mencapai 80.73% tingginya capaian ini disebabkan karena Program Perencanaan tenaga Kerja pada tahun 2025 Penyerapan Anggarannya mencapai 93.53%.

Tabel 3.1.1
tingkat efisiensi penggunaan sumberdaya

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA	PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
Meningkatkan Kesejahteraan Tenaga Kerja, Hubungan Industrial yang harmonis Serta Pelaksanaan Pembinaan Ketransmigrasian	Tingkat Pengangguran Terbuka	115.85	93.53	80.73

3.6. Analisis Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan

Adapun Program yang mendukung pencapaian indikator Tingkat Pengangguran Terbuka, adalah Program Perencanaan tenaga Kerja dengan Pagu Anggaran Rp. 43.951.988,- dan Realisasi Rp. 41.107.230,- dengan persentase Realisasi sebesar 93.53%.

Jumlah Pengangguran Terbuka Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2025

Tabel 3.2.2 Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Kegiatan Selama Seminggu Terakhir di Kabupaten Bolaang Mongondow, 2025
Population 15 Years of Age and Over by Educational Attainment and Type of Activity During the Last Week in

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan ¹ <i>Educational Attainment¹</i>	Angkatan Kerja/ <i>Labour Force</i>			Persentase Bekerja terhadap Angkatan Kerja <i>Percentage of Working to Labour Force</i>
	Bekerja <i>Working</i>	Pengangguran ² <i>Unemployment²</i>	Jumlah Angkatan Kerja <i>Total of Labour Force</i>	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0	59.019	1.011	60.030	98,32
1	28.520	1.286	29.806	95,69
2	39.887	4.048	43.935	90,79
3	8.878	783	9.661	91,90
Jumlah/Total	136.304	7.128	143.432	95,03

Sumber : Data BPS

Jumlah Angkatan Kerja Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2025

Tabel 3.2.2 Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Kegiatan Selama Seminggu Terakhir di Kabupaten Bolaang Mongondow, 2025
Population 15 Years of Age and Over by Educational Attainment and Type of Activity During the Last Week in

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan ¹ <i>Educational Attainment¹</i>	Angkatan Kerja/ <i>Labour Force</i>			Persentase Bekerja terhadap Angkatan Kerja <i>Percentage of Working to Labour Force</i>
	Bekerja <i>Working</i>	Pengangguran ² <i>Unemployment²</i>	Jumlah Angkatan Kerja <i>Total of Labour Force</i>	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0	59.019	1.011	60.030	98,32
1	28.520	1.286	29.806	95,69
2	39.887	4.048	43.935	90,79
3	8.878	783	9.661	91,90
Jumlah/Total	136.304	7.128	143.432	95,03

Sumber : Data BPS

Pengukuran capaian kinerja sasaran Persentase hubungan industrial yang diselesaikan diukur dengan rumus sebagai berikut :

$$\begin{aligned}\text{Persentase hubungan industrial yang diselesaikan} &= \frac{\text{Jumlah Kasus yang diselesaikan Dengan Perjanjian Bersama}}{\text{Jumlah Kasus yang tercatat}} \times 100 \% \\ &= \frac{2}{2} \times 100 \% \\ &= 100 \%\end{aligned}$$

a. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025

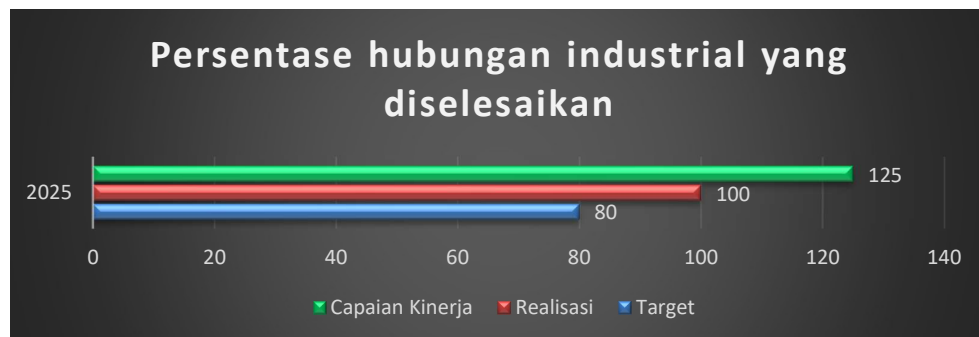
Perbandingan capaian kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bolaang Mongondow terhadap Indikator Persentase hubungan industrial yang diselesaikan Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 3.1.2
Capaian Target dan Realisasi Indikator Kinerja Persentase hubungan industrial yang diselesaikan Tahun 2025

Indikator Kinerja	Tahun 2025		
	Target	Realisasi	%
Persentase hubungan industrial yang diselesaikan	80	100	125

Berdasarkan tabel di atas pada tahun 2025 dapat dilihat bahwa indikator Persentase hubungan industrial yang diselesaikan dari Target 80 terealisasi 100% dengan capaian kinerja 125%

Grafik 12
Target, Realisasi dan Capaian Kinerja tahun 2025



b. Pernabdingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dan Tahun 2025

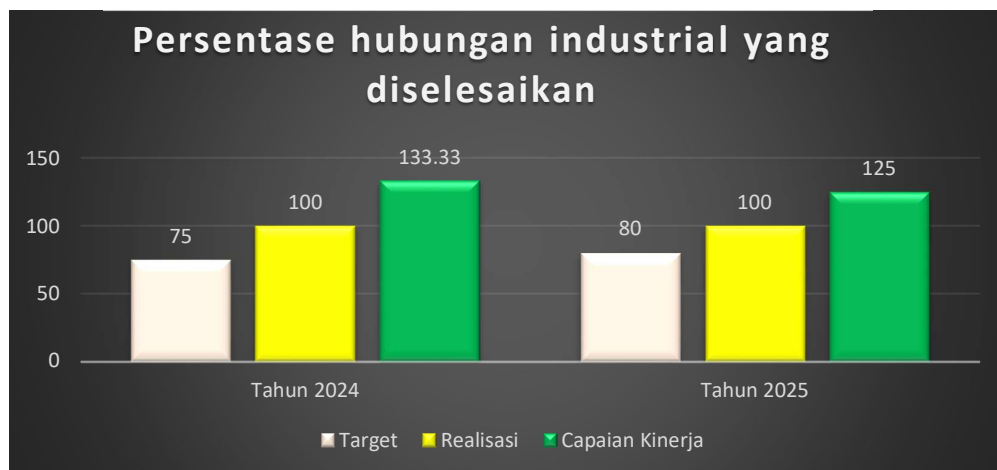
Perbandingan capaian kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bolaang Mongondow terhadap Indikator Persentase hubungan industrial yang diselesaikan Tahun 2024 dan Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 3.1.3
Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Persentase hubungan industrial yang diselesaikan Tahun 2024 dan 2025

Indikator Kinerja	Tahun 2024			Tahun 2025			Target Akhir Renstra	
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%		
Persentase hubungan industrial yang diselesaikan	75	100	133.33	80	100	125	90	143.52

Berdasarkan tabel diatas indikator Persentase hubungan industrial yang diselesaikan pada tahun 2025 dari target 80% terealisasi 100% dengan capaian kinerja 125%, dibandingkan dengan tahun 2024 ada Penurunan capaian kinerja sebesar 0.06%. Dan capaian kinerja terhadap target akhir renstra sebesar 143.52%. capaian tersebut dapat dilihat juga dalam grafik dibawah ini:

Grafik 12
Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2024 dan Tahun 2025



c. Capaian Kinerja Terhadap Renstra

Adapun perbandingan capaian indikator Persentase hubungan industrial yang diselesaikan Tahun 2024 – 2025 terhadap target akhir Renstra dapat kita lihat pada tabel berikut:

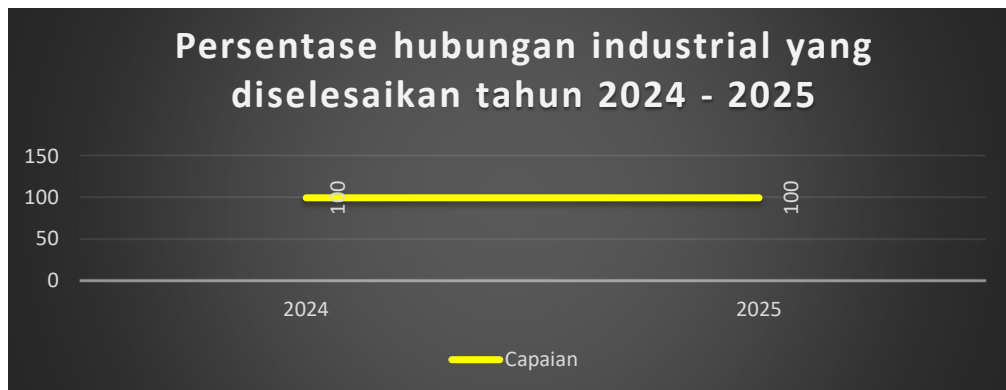
Tabel. 3.1.4
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Persentase hubungan industrial yang diselesaikan Tahun 2024 s/d 2025

Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2024	Capaian Tahun 2025	Target Akhir Renstra
Persentase hubungan industrial yang diselesaikan	100	100	90

Berdasarkan tabel diatas Capaian indikator Persentase hubungan industrial yang diselesaikan di Kabupaten Bolaang Mongondow selama 2 Tahun terakhir ada kenaikan atau penurunan,dapat dilihat tabel diatas pada tahun 2024 mencapai 100%, dibandingkan dengan tahun 2025 Persentase hubungan industrial yang diselesaikan mencapai 100%, tidak mengalami perubahan

Persentase hubungan industrial yang diselesaikan 2 Tahun Terakhir dapat juga kita lihat pada grafik berikut :

Grafik 13
Indikator Persentase hubungan industrial yang diselesaikan Tahun 2024 s/d Tahun 2025



d. Perbandingan Capaian Indikator Persentase Hubungan Industrial yang Diselesaikan Tingkat Kabupaten dan Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2025

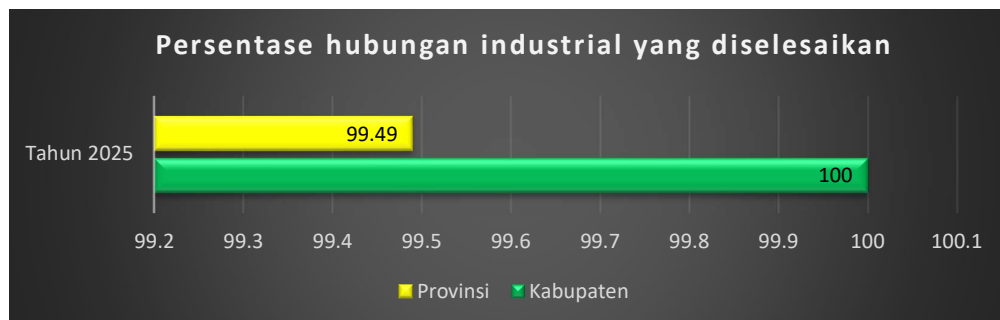
Capaian Persentase hubungan industrial yang diselesaikan Kabupaten Bolaang Mongondow dibandingkan dengan capaian di tingkat Provinsi Sulawesi Utara dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 3.1.5
Capaian Indikator Kinerja Persentase hubungan industrial yang diselesaikan di Tingkat Kabupaten dan Provinsi Sulawesi Utara

INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2025	
	KABUPATEN	PROVINSI
Persentase hubungan industrial yang diselesaikan	100	99.49

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa capaian Indikator Kinerja Persentase Hubungan Industrial yang diselesaikan di Tingkat Kabupaten Bolaang Mongondow pada Tahun 2025 sebesar 100%. Sedangkan di Provinsi Sulawesi Utara mencapai 99.49%. Dapat juga dilihat pada Grafik Berikut :

Grafik 14
Indikator Kinerja Persentase hubungan industrial yang diselesaikan di tingkat Kabupaten dan Provinsi Tahun 2025



2.7. Analisis penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Secara umum capaian kinerja sasaran Menurunnya perselisihan Hubungan Industrial (HI) dengan indikator Persentase Hubungan Industrial yang diselesaikan tahun 2025 sebesar 125% dapat dikatakan **“Sangat Berhasil”** hal ini disebabkan :

1. Penyelesaian Kasus Hubungan Industrial baik Kasus Perselisihan Hak, Kasus Perselisihan Bersama, dan Kasus Perselisihan PHK dapat terselesaikan melalui mediasi.
2. Penyelesaian kasus Hubungan Industrial difasilitasi dengan mediator hubungan industrial

Dari data diatas dapat dilihat bahwa indikator Persentase Hubungan Industrial yang diselesaikan di Kabupaten Bolaang Mongondow mencapai 100%.

2.8. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tingkat Efisiensi pada indikator Persentase Hubungan Industrial yang diselesaikan mencapai 142.86% tingginya capaian ini adalah pencapaian keberhasilan walaupun Program Perencanaan tenaga Kerja pada tahun 2024 tidak didukung oleh anggaran dan hanya di dukung dengan pagu anggaran kegiatan penunjang yaitu pada sub Kegiatan rapat-rapat koordinasi. Rp. 379.114.879,-

Tabel 3.1.6
Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN	PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
Menurunnya perselisihan Hubungan Industrial (HI)	Persentase hubungan industrial yang diselesaikan	125	91.36	136.82

2.9. ANALISIS PROGRAM / KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN

Pada Program Hubungan Industrial yang mendukung indicator kinerja Persentase Hubungan Industrial yang diselesaikan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2025, dengan Pagu Anggaran Rp. 1.693.641.600,- dan Realisasi sebesar 1.547.313.600,- Dengan Persentase 91.36%.



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA

Jln. Trans Sulawesi Desa Lolak Tombolango Kec. Lolak 95761

DATA PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

NO	NAMA PEKERJA	NAMA PERUSAHAAN	JENIS PERSELISIHAN	TANGGAL PENYELESAIAN	KETERANGAN
1	Abdul Gafur Damopolii	PT. Tolutug Marindo Pratama	Perselisihan PHK	24 November 2025	
2	Ridi Aswandi Monigir	PT. Prima Mega Blast	Perselisihan PHK	24 November 2025	

Lolak, Desember 2025

KEPALA DINAS


RENTI MOKOGINTA S.Pd, MAP
NIP. 19701009 199801 1 002

DATA PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2025

NO	DINAS TENAGA KERJA SE-PROV.SULUT	PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL			TOTAL KASUS
		BIPARTIT	PERJANJIAN BERSAMA	ANJURAN TERTULIS	
1	PROV.SULUT	2	28	7	37
2	KOTA BITUNG		17		17
3	KAB. MINAHASA UTARA	15			15
4	KOTA MANADO		74	10	84
5	KOTA TOMOHON		5		5
6	KAB. MINAHASA		3		3
7	KAB.MINAHASA SELATAN	4			4
8	KAB. MINAHASA TENGGARA	7			7
9	KOTA KOTAMOBAGU	13			13
10	KAB.BOLAANG MONGONDOW	2			2
11	KAB.BOLAANG MONGONDOW SELATAN	1			1
12	KAB.BOLAANG MONGONDOW TIMUR	1			1
13	KAB.BOLAANG MONGONDOW UTARA	1			1
14	KAB. SITARO	1			1
15	KAB. SANGIHE	5			5
16	KAB. TALAUD	0			0
Jumlah		52	127	17	196

JUMLAH PERSELISIHAN H.I YANG DISELESAIKAN MELALUI PERUNDINGAN BIPARTIT : 52 KASUS

JUMLAH PERSELISIHAN H.I YANG DISELESAIKAN MELALUI PERJANJIAN BERSAMA OLEH M : 127 KASUS

JUMLAH ANJURAN TERTULIS YANG DIKELUARKAN OLEH MEDIATOR H.I : 17 KASUS

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

DATA PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2025

NO	DINAS TENAGA KERJA SE-PROV.SULUT	JENIS PERSELISIHAN			
		PERSELISIHAN KEPENTINGAN	PERSELISIHAN HAK	PERSELISIHAN SP/SB	PERSELISIHAN PHK
1	PROV.SULUT	3	2		32
2	KOTA BITUNG		0		17
3	KAB. MINAHASA UTARA		15		
4	KOTA MANADO	4	10		70
5	KOTA TOMOHON		5		1
6	KAB. MINAHASA				3
7	KAB.MINAHASA SELATAN		4		
8	KAB. MINAHASA TENGGARA		7		
9	KOTA KOTAMOBAGU		13		
10	KAB.BOLAANG MONGONDOW		2		
11	KAB.BOLAANG MONGONDOW SELATAN		1		
12	KAB.BOLAANG MONGONDOW TIMUR		1		
13	KAB.BOLAANG MONGONDOW UTARA		1		
14	KAB. SITARO		1		
15	KAB. SANGIHE		5		
16	KAB. TALAUD		0		
Jumlah		7	67	0	123
Total Kasus Yang Tercatat		197			

JUMLAH PERSELISIHAN KEPENTINGAN	: 7 KASUS
JUMLAH PERSELISIHAN HAK	: 67 KASUS
JUMLAH PERSELISIHAN SP/SB DI PERUSAHAAN	: -
JUMLAH PERSELISIHAN PHK	: 123 KASUS

• **Sasaran 2 : Meningkatnya Pembinaan Ketransmigrasian**

<i>SASARAN STRATEGIS</i>	<i>INDIKATOR KINERJA</i>	<i>TARGET</i>
Meningkatkan Fasilitas Penetapan Kawasan Transmigrasi dan Pembinaan Pemukiman Transmigrasi	Presentase ketersediaan kawasan transmigrasi	5

1. Indikator Presentase ketersediaan kawasan transmigrasi

Pengukuran capaian kinerja sasaran Indikator Presentase ketersediaan kawasan transmigrasi diukur dengan rumus sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 \text{Presentase ketersediaan kawasan transmigrasi} &= \frac{\text{Jumlah Kawasan Transmigrasi yang diidentifikasi}}{\text{Jumlah Potensi Kawasan Transmigrasi}} \\
 &= \frac{0}{0} \times 100 \% \\
 &= 0 \%
 \end{aligned}$$

a. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025

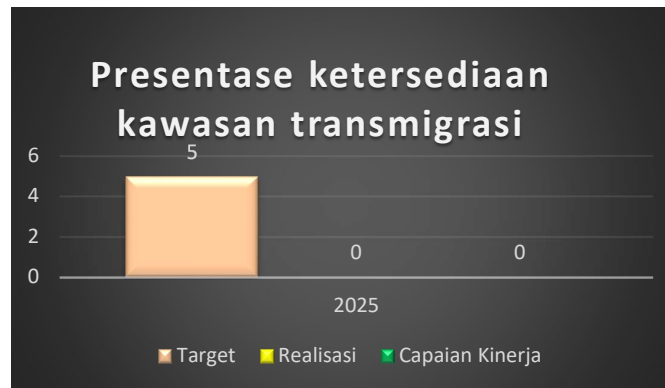
Perbandingan capaian kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bolaang Mongondow terhadap Indikator Presentase ketersediaan kawasan transmigrasi Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 3.1.7
Target dan Realisasi Capaian Tahun 2025

Indikator Kinerja	Tahun 2025			Target akhir renstra
	Target	Realisasi	%	
Presentase ketersediaan kawasan transmigrasi	5	0	0	100

Dari tabel di atas pada tahun 2025 dapat dilihat bahwa indikator Presentase ketersediaan kawasan transmigrasi dari Target 5 terealisasi 0 dengan capaian kinerja 0%

Grafik 15
Target dan Realisasi tahun 2025



b. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 dan Tahun 2024

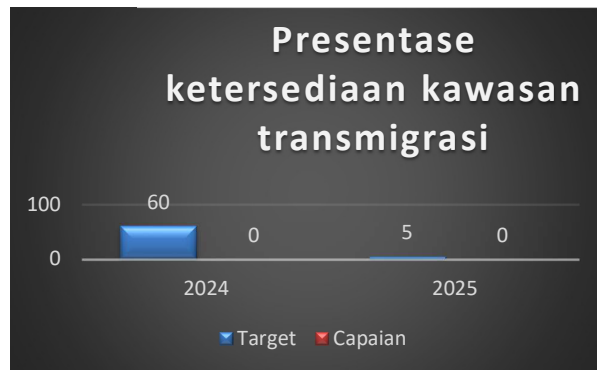
Perbandingan capaian indikator kinerja Presentase ketersediaan kawasan transmigrasi dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2023 dan Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 3.1.8
Perbandingan Capaian Indikator Kinerja
Tahun 2024 dan 2025

Indikator Kinerja	Tahun 2024			Tahun 2025			Target akhir renstra
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
Presentase ketersediaan kawasan transmigrasi	60	0	0	5	0	0	100

Berdasarkan tabel diatas indikator Presentase ketersediaan kawasan transmigrasi pada tahun 2025 dari target 5% terealisasi 0% dengan capaian kinerja 0% dibandingkan dengan tahun 2024 tidak ada perubahan dengan capaian kinerja sebesar 0%.

Grafik 16
perbandingan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2024 dan Tahun 2025



c. Capaian Kinerja Terhadap Renstra

Adapun perbandingan capain indikator Capaian Indikator Kinerja Sasaran Presentase ketersediaan kawasan transmigrasi Tahun 2024 – 2025 terhadap target akhir Renstra dapat kita lihat pada tabel berikut :

Tabel. 3.1.8
Capaian Indikator Presentase ketersediaan kawasan transmigrasi
Tahun 2024 s/d 2025

Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2024	Capaian Tahun 2025	Target Akhir Renstra
Presentase ketersediaan kawasan transmigrasi	0	0	100

Berdasarkan tabel diatas untuk cakupan Presentase ketersediaan kawasan transmigrasi yang sumberdatanya dari Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Bolaang Mongondow, pada tahun 2024 mencapai 0, dan pada tahun 2025 mencapai 0. Dapat kita lihat bahwa indikator Presentase ketersediaan kawasan transmigrasi dari tahun ke tahun capaian kinerjanya tidak ada kenaikan yang signifikan namun untuk capaian kinerjanya dapat dikatakan **“Tidak Berhasil”**. Capaian indikator kinerja Presentase ketersediaan kawasan transmigrasi dapat juga kitalihat pada grafik berikut :

Grafik 17
*Capaian Indikator Presentase ketersediaan kawasan transmigrasi
Tahun 2024 s/d 2025*



2.10. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN / KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN / PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATAIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN

Secara umum capaian kinerja sasaran Presentase ketersediaan kawasan transmigrasi **“Tidak Berhasil”** hal ini disebabkan oleh :

1. sarana dan prasarana Wilayah Transmigrasi yang ada di Kabupaten Bolaang Mongondow Belum Ada
2. Wilayah Kawasan Transmigrasi belum tertata di Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

2.11. ANALISIS PROGRAM / KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN

Pada Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi yang mendukung indikator kinerja Presentase ketersediaan kawasan transmigrasi di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2025, dengan Pagu Anggaran Rp. 0,- dan Realisasi 0%

2.12. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Tingkat efisiensi dari indikator Presentase ketersediaan kawasan transmigrasi Tahun 2025 sebesar 0%, hal ini disebabkan karena kinerja dari indikator Presentase ketersediaan kawasan transmigrasi tersebut dapat dikatakan belumbisa di realisasikan, karena belum adanya kawasan transmigrasi.

1.2. REALISASI ANGGARAN

Dalam melaksanakan kegiatan yang merupakan tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bolaang Mongondow pada tahun anggaran 2025, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bolaang Mongondow memperoleh sumber dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam bentuk DPPA-SKPD tahun 2025 dengan rencana dan realisasi anggaran sebagai berikut:

3.2.1. Anggaran dan Realisasi APBD

Anggaran Belanja dari DPPA-SKPD Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bolaang Mongondow tahun anggaran 2025 sebesar **Rp. 7,462,060,643,-** naik **0.46%** dibanding anggaran yang dikelola Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja tahun 2024 sebesar **Rp. 5.126.699.731,-**

Belanja Operasi yang dikelola Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bolaang Mongondow dari APBD Perubahan pada tahun anggaran 2025 sebesar **5,410,502,553,-** naik **0.06%** dibanding anggaran yang dikelola Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bolaang Mongondow tahun 2024 sebesar **Rp. 5,126,699,731,-**

Jumlah anggaran Belanja Modal yang dikelola Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bolaang Mongondow dari APBD Kabupaten Bolaang Mongondow tahun 2025 sebesar **Rp. 2,051,558,090,-** Naik **95.16%** dibanding anggaran belanja tidak langsung tahun 2024 yang lalu sebesar **Rp. 21,335,921,-**

Realisasi Belanja Operasi pada Tahun Anggaran 2025 mencapai 83.12% Realisasi ini lebih rendah dibandingkan dengan capaian tahun 2024 yang mencapai 82.41%. Hal ini terjadi karena bertambahnya anggaran pada program hubungan industrial di Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Bolaang Mongondow Pada tahun 2025, sehingga realisasi Belanja Operasi pada tahun 2025 Rp. 4,497,421,994,- dari Anggaran sebesar Rp. 5,410,502,553,-

Sedangkan untuk realisasi Belanja Modal pada Tahun Anggaran 2025 adalah 82.38 %. Capaian ini lebih tinggi dari capaian tahun 2024 yang mencapai 99%. Hal ini disebabkan karena adanya pagu anggaran untuk belanja modal di tahun 2025 sebesar **Rp. 2,051,558,090,-** sedangkan untuk pagu anggaran belanja modal di tahun 2024 sebesar **Rp. Rp. 21,335,921,-**.

Perbandingan realisasi anggaran APBDP Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tahun 2024 dan tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 3.2.1. di bawah:

Tabel. 3.2.1.
Perbandingan Capaian Anggaran Tahun 2024 dan Tahun 2025

Jenis Belanja	Tahun 2024			Tahun 2025		
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
Belanja Operasi	5,126,669,731	4,224,933,893	82.41	5,410,502,553	4,497,421,994	83.12
Belanja Modal	21,335,921	21,050,000	99	2,051,558,090	1,689,998,374	82.38
Jumlah	5,148,035,652	4,245,983,839	82	7,462,060,643	6,187,420,368	82.92

3.2.2. Anggaran dan Realisasi Per Kegiatan

Capaian kinerja pada realisasi anggaran untuk masing-masing program/kegiatan ditunjukkan seperti pada Tabel 3.2.2 dibawah:

Tabel.3.2.2
Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Capaian Realisasi anggaran Tahun 2025

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SUMBER DANA	JUMLAH ANGGARAN (Rp)	REALISASI	%	KET
1	2	3	4	5	6	7
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	DAU	5,547,358,401	4,598,999,538	82.90	
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	DAU	2.848.115.124	2.290.042.510	80.41	
-	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DAU	2.789.176.855	2.233.228.620	80.07	
-	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	DAU	58.938.269	56.813.890	96.40	
2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	DAU	17.482.500	7.482.500	100	
-	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	DAU	17.482.500	7.482.500	100	
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	DAU	344.037.000	344.010.610	100	
-	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DAU	344.037.000	344.010.610	100	
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	DAU	2.051.558.090	1.689.998.374	82.38	
-	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DAU	51.397.690	48.000.000	93.39	
-	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DAU	2.000.160.400	1.641.998.374	82.09	
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DAU	114.188.579	108.483.634	95	
-	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DAU	15.898.425	13.483.634	84.81	
-	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	DAU	98.290.154	95.000.000	96.65	
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DAU	171.977.108	148.981.910	86.63	
-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak, kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	DAU	83.727.108	62.376.910	74.50	
-	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DAU	5.000.000	3.355.000	67.10	
-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	DAU	83.250.000	83.250.000	100	
II	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	DAU	43.951.988	41.107.230	93.53	
1	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	DAU	43.951.988	41.107.230	93.53	
-	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	DAU	43.951.988	41.107.230	93.53	
III	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	DAU	177.108.654	0	0	

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

1	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	DAU	177.108.654	0	0	
-	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	DAU	177.108.654	0	0	
IV	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	DAU	1.693.641.600	1.547.313.600	91.36	
1	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	DAU	1.693.641.600	1.547.313.600	91.36	
-	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	DAU	1.693.641.600	1.547.313.600	91.36	
Jumlah			7,462,060,643	6,187,420,368	82.92	

A. Progran Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota

1. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b. Pelaksanaan Pentausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
2. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - a. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a. Fasilitas Kunjungan Tamu
 - b. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
4. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - b. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak, kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
 - b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

- c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

B. Program Perencanaan Tenaga Kerja

- 1. Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)
 - a. Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro

C. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja

- 1. Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi
 - a. Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi

D. Program Hubungan Industrial

- 1. Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama Untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota
 - a. Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

BAB IV
PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan pertanggungjawaban serta sarana penyampaian informasi tentang sejauh mana capaian kinerja tahunan yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 maupun di dalam RENSTRA Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bolaang Mongondow tahun 2023 - 2026 yang diamanahkan masyarakat dan pimpinan di atasnya.

5.1. KESIMPULAN ATAS CAPAIAN KERJA ORGANISASI

Berdasarkan capaian kinerja organisasi pada Bab III di atas dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja sasaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bolaang Mongondow pada tahun 2025 dengan indikator Tingkat Pengangguran Terbuka, capaian **“Sangat Berhasil”**, indikator Persentase hubungan industrial yang diselesaikan, capaian **“Sangat Berhasil”**, dan indikator sasaran Presentase ketersediaan kawasan transmigrasi **“Tidak Berhasil”**.

Sedangkan untuk realisasi anggaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tahun 2025 sebesar Rp. 6,187,420,368,- mencapai 82.92%,

5.2. SARAN DAN TINDAK LANJUT

Dalam upaya untuk meningkatkan kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bolaang Mongondow pada tahun mendatang ada beberapa langkah strategis yang akan dilakukan antara lain :

1. Mengusulkan kembali kegiatan – kegiatan yang belum teranggarkan pada tahun – tahun sebelumnya, untuk mencapai sasaran yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Bolaang Mongondow 2023 – 2026
2. Meningkatkan pemantauan, Pembinaan melalui program kegiatan serta pendekatan sehingga diharapkan adanya informasi timbal balik dari Perusahaan – Perusahaan yang berkaitan dengan penerimaan tenaga kerja.
3. Mengkoordinasikan dengan Pemerintah Pusat mengenai program – program yang berkaitan dengan Transmigrasi dan Ketenaga Kerjaan
4. Meningkatkan Sumber Daya Manusia sesuai dengan potensi dan kompetensi.

LAMPIRAN – LAMPIR